



Kemiskinan, Ketimpangan, *dan* Kebijakan Fiskal

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

**Nursini
Andi Nur Ildha Arfanita**

Editor: Syamsu Alam

KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN
KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Nursini
Andi Nur Ildha Arfanita



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Penulis:
Nursini
Andi Nur Ildha Arfanita

Desain Cover:
Praksis Digital Nusantara

Editor:
Syamsu Alam

Proofreader:
Praksis Digital Nusantara

Ukuran:
xi, 190, uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-166-0

Cetakan Pertama:
April 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557
email: tahtaliterasimedia@gmail.com
website: <http://store.tahtamedia.co.id/>
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ajar ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ajar ini disusun sebagai bagian dari upaya pengembangan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran di bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kebijakan fiskal, serta ketahanan dan kemandirian pangan.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensional, terutama di tingkat daerah. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, perencanaan pembangunan, dan kondisi sosial ekonomi daerah.

Buku ajar ini disusun dengan pendekatan konseptual, metodologis, dan empiris yang terintegrasi, serta dilengkapi dengan studi kasus pembangunan daerah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa tidak hanya memahami teori dan konsep, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas pembangunan di tingkat daerah. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pembelajaran di bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah.

PRAKATA

Buku ajar ini disusun untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah yang membahas kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kebijakan fiskal, dan pembangunan daerah. Penyusunan buku ini didasarkan pada kebutuhan akan bahan ajar yang tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga mampu mengaitkan konsep dan kebijakan dengan kondisi empiris daerah secara sistematis dan mudah dipahami oleh mahasiswa.

Struktur buku ini dirancang secara bertahap, dimulai dari pembahasan konsep dan teori kemiskinan serta ketimpangan pendapatan, dilanjutkan dengan pembahasan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan, hingga analisis kondisi sosial ekonomi daerah dan perumusan model pengentasan kemiskinan. Penempatan metodologi dan kerangka analisis dalam buku ini dimaksudkan sebagai alat bantu konseptual untuk memahami hubungan antarvariabel pembangunan, bukan sebagai panduan teknis penelitian yang bersifat kaku.

Sebagai buku ajar, penyajian materi dilakukan secara naratif dan reflektif, disertai dengan rangkuman dan soal latihan pada setiap bab. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir analitis, kritis, dan aplikatif dalam memahami persoalan Pembangunan nasional dan daerah. Studi kasus yang digunakan dalam buku ini dimaksudkan sebagai contoh penerapan konsep dan kebijakan, sehingga mahasiswa dapat menarik pembelajaran yang lebih luas untuk konteks negara/daerah lainnya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	IV
PRAKATA	V
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Pembelajaran.....	1
B. Kemiskinan dan Ketimpangan sebagai Tantangan Pembangunan..	1
C. Peran Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	4
D. Urgensi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Inklusif	5
E. Rangkuman Bab I.....	6
F. Soal Latihan Bab I.....	8
BAB II KONSEP DASAR KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN	10
A. Tujuan Pembelajaran.....	10
B. Konsep dan Ukuran Kemiskinan.....	10
C. Konsep dan Ukuran Ketimpangan Pendapatan	14
D. Pertumbuhan Ekonomi, Hipotesis Kuznets, dan Kritiknya.....	18
E. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pro-Poor Growth	19
F. Rangkuman Bab II	20
G. Soal Latihan Bab II	21
BAB III KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN	22
A. Tujuan Pembelajaran.....	22
B. Konsep Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan	22
C. Belanja Publik dan Pengentasan Kemiskinan	25
D. Pajak, Redistribusi, dan Keadilan Sosial.....	27
E. Kebijakan Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan.....	30
F. Desentralisasi Fiskal dan Peran Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan.....	34
G. Rangkuman Bab III	35
H. Soal Latihan Bab III	36

BAB IV METODOLOGI ANALISIS KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN KEBIJAKAN FISKAL	37
A. Tujuan Pembelajaran.....	37
B. Peran Metodologi dalam Kajian Pembangunan	37
C. Pendekatan Analisis dalam Studi Kemiskinan dan Ketimpangan.....	38
D. Data dan Sumber Data dalam Analisis Pembangunan	39
E. Metode Analisis dalam Kajian Kemiskinan dan Kebijakan Fiskal.....	39
F. Kerangka Analisis dan Keterkaitan Antar variabel.....	40
G. Etika dan Keterbatasan Metodologis.....	44
H. Rangkuman Bab IV	46
I. Soal Latihan Bab IV	47
BAB V PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEMANDIRIAN PANGAN	48
A. Tujuan Pembelajaran.....	48
B. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah	48
C. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran	51
D. Kemandirian Pangan sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	57
E. Kebijakan Pangan dalam Perspektif Fiskal Daerah.....	61
F. Implikasi Perencanaan Pembangunan dan Kemandirian Pangan bagi Pembangunan Daerah Agraris.....	64
G. Rangkuman Bab V	66
H. Soal Latihan V.....	66
BAB VI KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH SERTA DINAMIKA KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN.....	68
A. Tujuan Pembelajaran.....	68
B. Struktur Perekonomian Nasional dan Daerah	68
2. Pertumbuhan Dan Struktur Ekonomi Daerah.....	82
C. Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, dan Distribusi Kesejahteraan	98
D. Dinamika kemiskinan nasional dan daerah	99
E. Rangkuman Bab VI.....	119
F. Soal Latihan Bab VI.....	121
BAB VII ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAN DAERAH	124
A. Tujuan Pembelajaran.....	124
B. Kebijakan Fiskal Nasional	124

C. Analisis Kebijakan Fiskal Daerah	135
D. Kebijakan Fiskal Daerah dalam konteks kemiskinan.....	149
E. Rangkuman Bab VII.....	152
F. Soal Latihan Bab VII.....	154
BAB VIII ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL	156
A. Tujuan Pembelajaran.....	156
B. Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	157
C. Peran Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Bone	166
D. Rangkuman Bab VIII	176
E. Soal Latihan Bab VIII	177
BAB IX PENUTUP.....	179
DAFTAR PUSTAKA	183

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Contoh Distribusi Pendapatan yang Merata	15
Tabel 2. 2. Contoh Distribusi Pendapatan yang tidak merata.....	16
Tabel 2. 3. Ilustratif Distribusi Pengeluaran Penduduk.....	17
Tabel 6. 1. Perkembangan struktur perekonomian Indonesia periode 2010-2024	71
Tabel 6. 2. Kontribusi PDRB terhadap PDB menurut provinsi di Indonesia, 2016-2024.....	85
Tabel 6. 3. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, 2015-2024	89
Tabel 6. 4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Seluruh Provinsi di Indonesia, 2015-2024.....	1099
Tabel 8. 1. Statistik Deskriptif.....	1577
Tabel 8. 2. Dampak PDRB per kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan	159
Tabel 8. 3. Pengaruh pajak terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan	1600
Tabel 8. 4. Pengaruh pengeluaran pemerintah pendidikan dan Kesehatan terhada ketimpangan pendapatan dan kemiskinan	1611
Tabel 8. 5. Pengaruh Pengeluaran Perlindungan Sosial terhadap Ketimpangan dan Kemiskinan	1622
Tabel 8. 6. Program Pengentasan Kemiskinan berbasis Klaster di Kabupaten Polman	1688
Tabel 8. 7. Program Pengentasan Kemiskinan dan rincian anggaran berdasarkan strategi pengurangan beban pengeluaran	16969
Tabel 8. 8. Program Pengentasan Kemiskinan dan rincian anggaran berdasarkan strategi peningkatan pendapatan	1700
Tabel 8. 9. Program Pengentasan Kemiskinan dan rincian anggaran berdasarkan strategi pengurangan kantong kemiskinan	1700

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kurva Lorenz (Ilustratif Representatif)	177
Gambar 4. 1. Kerangka Konseptual Hubungan Antar Variabel	43
Gambar 5. 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Berdasarkan UU.No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	52
Gambar 5. 2. Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran ...	55
Gambar 6. 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1990- 2024	766
Gambar 6. 2. Struktur Perekonomian Nasional Berdasar Tiga Sektor (Primer, Sekunder, Dan Jasa)	80
Gambar 6. 3. Kontribusi PDRB terhadap PDB Nasional menurut Pulau	888
Gambar 6. 4. Peta Struktur ekonomi berdasarkan sektor dan provinsi, 2024	95
Gambar 6. 5. Perkembangan Kemiskinan P0, P1, P2 di Indonesia, 2015-2024	100
Gambar 6. 6. Peta persentase penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia, 2024	1022
Gambar 6. 7. Perkembangan Gini Ratio Indonesia, 2010-2024	1044
Gambar 6. 8. Indeks Kedalaman Kemiskinan, 2015 dan 2024	1122
Gambar 6. 9. Indeks Keparahan Kemiskinan, 2015 dan 2024	1166
Gambar 6. 10. Gini rasio menurut provinsi di Indonesia, 2024	11818
Gambar 7. 1. Perkembangan total pendapatan negara dan pertumbuhan, 2019-2025	1266
Gambar 7. 2. Perkembangan Pendapatan dari perpajakan dan bukan pajak, 2018-2025	12828
Gambar 7. 3. Perkembangan rasio pendapatan terhadap PDB, 2018-2025	1300
Gambar 7. 4. Perkembangan belanja Negara dan pertumbuhan, 2018-2025	1322
Gambar 7. 5. Perkembangan rasio belanja terhadap PDB, 2018-2025	1333
Gambar 7. 6. Perbandingan Rasio Pendapatan dan Belanja Negara terhadap PDB	1355
Gambar 7. 7. Perkembangan total pendapatan seluruh daerah (provinsi+kab/kota) di Indonesia, 2018-2024	13636

Gambar 7. 8. Perkembangan struktur Pendapatan Daerah di Indonesia,
2018-2024..... 13838

Gambar 7. 9. Perkembangan Proporsi sumber pendapatan terhadap
Pendapatan Daerah di Indonesia..... 14040

Gambar 7. 10. Pendapatan Daerah menurut Provinsi di Indonesia,
2024 14343

Gambar 7. 11. Struktur Pendapatan Daerah menurut Provinsi di
Indonesia, 2024..... 1477

Gambar 8. 1. Program Pengentasan Kemiskinan dan rincian anggaran
berdasarkan strategi pengurangan kantong kemiskinan 17676

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Bab I, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami latar belakang permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam konteks pembangunan daerah.
2. Menjelaskan urgensi kajian kemiskinan dan ketimpangan sebagai isu utama dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan publik.
3. Mengidentifikasi peran kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kompleksitas persoalan pembangunan daerah dan tantangan pengentasan kemiskinan.

B. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SEBAGAI TANTANGAN PEMBANGUNAN

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan dua persoalan utama yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Data kemiskinan global menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dunia kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan global yang tercermin dari nilai Gini rasio rata-rata dunia (World Bank, 2024; Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Secara konseptual, kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, sedangkan ketimpangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata antar kelompok masyarakat (Perkins et al., 2013; Galor & Zeira, 1993).

Kedua permasalahan ini sering kali saling berkaitan, namun tidak selalu bergerak searah. Penurunan kemiskinan tidak secara langsung diikuti oleh penurunan ketimpangan, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi empiris di negara berkembang (Fosu, 2017; Lakner et al., 2022).

Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan, namun ketimpangan pendapatan justru menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung meningkat pada periode tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan lebih menekankan pada pengentasan kemiskinan absolut dibandingkan pemerataan hasil pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2023). Padahal, studi empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan salah satu determinan utama kemiskinan (Ali et al., 2022; Cerra et al., 2021).

Ketimpangan yang tinggi tidak hanya berdampak pada distribusi pendapatan, tetapi juga berimplikasi terhadap efektivitas pertumbuhan ekonomi. Ravallion (1997) dan Kakwani et al. (2000) menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi lebih rendah di wilayah dengan tingkat ketimpangan awal yang tinggi. Artinya, pertumbuhan ekonomi menjadi kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan ketika ketimpangan pendapatan tidak dikendalikan.

Oleh karena itu, kemiskinan dan ketimpangan perlu dipahami sebagai tantangan pembangunan yang bersifat struktural. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan mensyaratkan adanya strategi pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat pembangunan secara adil dan inklusif (Ravallion, 2001; de Janvry & Sadoulet, 2021).

Selain sebagai permasalahan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan juga merupakan persoalan sosial dan kelembagaan yang saling berkaitan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi antar individu atau kelompok, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Galor dan Zeira (1993) menegaskan bahwa ketimpangan dapat membatasi investasi sumber daya manusia kelompok miskin karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memperkuat perangkap kemiskinan antargenerasi. Dalam

kondisi tersebut, kemiskinan tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjadi struktural dan sulit diatasi hanya melalui pertumbuhan ekonomi.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperlambat laju penurunan kemiskinan, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung relatif stabil. Fosu (2017) menemukan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan menjadi jauh lebih lemah di negara atau wilayah dengan tingkat ketimpangan awal yang tinggi. Temuan ini diperkuat oleh Lakner et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan global. Dengan kata lain, ketimpangan bukan sekadar dampak sampingan dari pembangunan, tetapi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan kemiskinan dan ketimpangan semakin kompleks karena adanya disparitas antar wilayah dan antar kelompok sosial. Perbedaan struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas fiskal daerah menyebabkan manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata. Data nasional menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan, sebagaimana tercermin dari dinamika indeks Gini dalam beberapa tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan yang berfokus pada penurunan kemiskinan absolut belum cukup untuk mengatasi ketimpangan struktural yang ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dan ketimpangan perlu dipahami sebagai tantangan pembangunan yang saling terkait dan memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan tidak hanya menuntut peningkatan pendapatan kelompok miskin, tetapi juga perbaikan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi secara lebih adil. Pendekatan ini menempatkan ketimpangan sebagai variabel penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pencapaian jangka pendek, tetapi mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif dalam jangka panjang (Ravallion, 2001; de Janvry & Sadoulet, 2021).

C. PERAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesempatan ekonomi. Kuznets (1955; 1963) mengemukakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk U-terbalik, di mana ketimpangan meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap selanjutnya. Namun, hipotesis ini banyak diperdebatkan oleh studi-studi empiris berikutnya.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan dan memperbaiki standar hidup masyarakat miskin (Ravallion & Chen, 2022; Amar & Pratama, 2020; Kouadio & Gakpa, 2022). Namun, studi lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan, bahkan dalam beberapa kasus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Adams, 2003; Usmanova, 2023; Ali et al., 2022). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan bersifat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh konteks struktural suatu wilayah.

Kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen pemerintah untuk mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin dan mengurangi kesenjangan sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial (Hirvonen et al., 2018; Cammeraat, 2020). Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada desain dan ketepatan sasaran kebijakan. Pajak yang bersifat regresif atau belanja sosial yang tidak tepat sasaran berpotensi gagal menurunkan ketimpangan, bahkan dapat memperburuk distribusi pendapatan (Higgins & Pereira, 2013; Bucheli et al., 2018).

Berbagai studi mutakhir juga menyoroti pentingnya mekanisme tidak langsung dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan sering kali berperan sebagai variabel perantara yang menentukan seberapa besar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh kelompok miskin. Ravallion (2001) dan Fosu (2017) menunjukkan bahwa lemahnya interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan menjadi salah satu penyebab utama mengapa pertumbuhan dan kebijakan fiskal tidak selalu efektif menurunkan kemiskinan melalui jalur ketimpangan. Temuan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan kebijakan makro semata.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan membutuhkan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kebijakan fiskal yang pro-poor. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan agar melibatkan kelompok miskin secara aktif, sementara kebijakan fiskal harus dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi penduduk miskin secara berkelanjutan. Tanpa sinergi tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya menghasilkan penurunan kemiskinan jangka pendek tanpa mampu mengatasi ketimpangan struktural.

D. URGENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dalam sistem pemerintahan yang menerapkan desentralisasi fiskal seperti Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Kewenangan tersebut menjadikan perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen kunci dalam menerjemahkan tujuan pembangunan nasional ke dalam kebijakan yang relevan dan efektif di tingkat lokal.

Pembangunan yang inklusif tidak dapat dicapai tanpa perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang lemah, tidak berbasis data, atau tidak terintegrasi dengan penganggaran berpotensi menghasilkan program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran dan kurang berkelanjutan.

Hal ini sering tercermin dalam tumpang tindih program antar perangkat daerah, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta minimnya evaluasi dampak kebijakan terhadap kelompok miskin dan rentan (Wicaksono, 2017; Nursini et al., 2018).

Urgensi perencanaan pembangunan daerah semakin meningkat karena pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal tidak selalu efektif menurunkan kemiskinan melalui penurunan ketimpangan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai instrumen penghubung antara kebijakan makro dan kondisi mikro masyarakat. Perencanaan yang baik memungkinkan pemerintah daerah memetakan kantong-kantong kemiskinan, mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat, serta merancang intervensi pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal (Nursini, 2020).

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian pangan sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Bagi rumah tangga miskin, pangan merupakan komponen terbesar dalam struktur pengeluaran. Ketergantungan yang tinggi terhadap pasar pangan membuat kelompok miskin sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan guncangan ekonomi. Melalui perencanaan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan produksi pangan lokal, memperluas akses terhadap lahan dan sarana produksi, serta memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat miskin. Upaya tersebut tidak hanya mengurangi beban pengeluaran, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipahami sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan. Perencanaan yang berkualitas mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan kebutuhan riil masyarakat sehingga pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan (de Janvry & Sadoulet, 2021; Asongu & Eita, 2023).

E. RANGKUMAN BAB I

Bab I membahas kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai tantangan utama pembangunan ekonomi yang hingga kini masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan

dua permasalahan yang saling berkaitan namun tidak selalu bergerak searah. Penurunan tingkat kemiskinan tidak berjalan parallel dengan penurunan ketimpangan pendapatan, karena manfaat pembangunan sering kali terdistribusi secara tidak merata antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Bab ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat akses kelompok miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, sehingga memperlemah dampak pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemiskinan struktural. Oleh karena itu, kemiskinan dan ketimpangan perlu dipahami sebagai persoalan pembangunan yang bersifat struktural dan memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi.

Selanjutnya, bab ini mengkaji peran pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi secara teoritis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan, namun bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Kebijakan fiskal, melalui instrumen pajak dan belanja pemerintah, berperan untuk mengoreksi ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada desain kebijakan dan ketepatan sasaran, karena kebijakan yang tidak tepat dapat gagal menurunkan kemiskinan dan bahkan memperburuk ketimpangan.

Bab ini juga menekankan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, kemiskinan, dan ketimpangan bersifat kompleks. Ketimpangan pendapatan sering kali berperan sebagai variabel perantara yang menentukan seberapa besar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh kelompok miskin. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan memerlukan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kebijakan fiskal yang pro-poor.

Pada bagian akhir, bab ini menguraikan urgensi perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Dalam konteks desentralisasi fiskal, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan makro dan kondisi mikro masyarakat. Perencanaan yang berkualitas, berbasis data, dan terintegrasi dengan penganggaran diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan

benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, termasuk dalam mendorong kemandirian pangan sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian, Bab I memberikan landasan konseptual dan kebijakan bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

F. SOAL LATIHAN BAB I

1. Jelaskan perbedaan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta mengapa kedua konsep tersebut tidak selalu bergerak searah.
2. Mengapa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan?
3. Jelaskan peran kebijakan fiskal dalam mengoreksi ketimpangan pendapatan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar.
4. Analisis mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menghasilkan pembangunan yang inklusif. Gunakan contoh empiris atau ilustrasi sederhana.
5. Jelaskan bagaimana ketimpangan pendapatan dapat berperan sebagai variabel perantara dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
6. Analisis perbedaan dampak belanja pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan belanja perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.
7. Sebuah daerah mengalami penurunan tingkat kemiskinan, namun pada saat yang sama ketimpangan pendapatan meningkat. Analisis kemungkinan penyebab terjadinya fenomena tersebut dan berikan rekomendasi kebijakan yang tepat.
8. Jelaskan bagaimana perencanaan pembangunan daerah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.
9. Analisis peran kemandirian pangan dalam mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga miskin di daerah perdesaan.
10. Menurut Anda, apakah pengentasan kemiskinan harus diprioritaskan dibandingkan pengurangan ketimpangan, atau sebaliknya? Jelaskan apurmen Anda berdasarkan konsep yang dipelajari pada Bab I.

11. Diskusikan peran perencanaan pembangunan daerah dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat paling miskin dan rentan.

BAB II

KONSEP DASAR KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Bab II, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan definisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berdasarkan berbagai perspektif teori pembangunan.
2. Memahami pendekatan pengukuran kemiskinan dan ketimpangan, serta keterbatasan masing-masing pendekatan.
3. Menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan dalam kerangka teori ekonomi pembangunan.
4. Mengaitkan teori kemiskinan dan ketimpangan dengan kebijakan publik, khususnya kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.
5. Membangun kerangka pemahaman teoretis sebagai dasar untuk membaca analisis empiris dan kebijakan pada bab-bab selanjutnya.

B. KONSEP DAN UKURAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan fenomena pembangunan yang bersifat kompleks, struktural, dan multidimensional, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kondisi rendahnya pendapatan atau konsumsi. Secara tradisional, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Perkins et al. (2013) memandang kemiskinan sebagai keterbatasan sistemik yang dialami individu atau kelompok masyarakat dalam mengakses

sumber daya ekonomi, layanan publik, dan kesempatan pembangunan. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kemiskinan semakin luas yakni mencakup dimensi sosial, pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, serta kerentanan terhadap risiko ekonomi dan sosial (World Bank, 2022). Dalam perspektif ini, rendahnya pendapatan hanyalah salah satu manifestasi dari kemiskinan, sementara akar permasalahannya terletak pada ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal, teknologi, serta kelemahan institusi ekonomi dan politik yang mengatur distribusi sumber daya.

Menurut Perkins et al. (2013), kemiskinan juga berkaitan erat dengan kegagalan pasar dan kegagalan kelembagaan. Ketika mekanisme pasar tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang layak dan institusi publik tidak efektif dalam menyediakan layanan dasar, kelompok masyarakat tertentu akan terperangkap dalam kemiskinan yang bersifat persisten. Kondisi ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi saja sering kali tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan, terutama di negara berkembang dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki distribusi sumber daya dan memperkuat kapasitas kelompok miskin.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Brady (2019) yang menekankan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kerentanan multidimensional yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan institusional. Bradley melihat kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas individu dalam menghadapi risiko dan guncangan ekonomi, seperti krisis ekonomi, fluktuasi harga pangan, bencana alam, dan perubahan struktur pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, kelompok miskin tidak hanya mengalami kekurangan pendapatan, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang rendah, sehingga lebih rentan terhadap guncangan eksternal dan lebih sulit keluar dari kemiskinan tanpa dukungan kebijakan publik yang memadai.

Konsep kemiskinan juga dikaitkan pemikiran konsep pembangunan manusia oleh Amartya Sen (1999) dengan pendekatan kapabilitas bahwa kemiskinan adalah kegagalan dalam mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan dan keterbatasan kebebasan untuk memilih kehidupan yang bernilai. Dengan demikian, kemiskinan mencerminkan kurangnya kemampuan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan menggabungkan beberapa pandangan tersebut, maka

konsep kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi keterbatasan struktural dan kerentanan multidimensional yang saling terkait. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan kegagalan individu dalam memperoleh pendapatan, keterbatasan dalam berpartisipasi, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pembangunan dalam menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya, layanan dasar, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, mencakup peningkatan pendapatan, perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kelembagaan ekonomi, serta perlindungan terhadap risiko dan guncangan ekonomi. Pemahaman konseptual ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam kerangka pembangunan daerah dan pengurangan ketimpangan pendapatan.

Sejalan dengan berbagai pandangan seperti Amartya Sen (1999), Perkins et al. (2013), Brady (2019), dan World Bank (2022) yang menekankan kemiskinan sebagai fenomena struktural dan multidimensional, maka pengukuran kemiskinan juga berkembang seiring dengan perkembangan konsepnya. Beberapa ukuran kemiskinan seperti Multidimensional Poverty Index (MPI), Poverty gap index, poverty severity index, dan headcount index.

Untuk di Indonesia oleh BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar untuk mengidentifikasi keterbatasan minimum yang dihadapi rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam praktik pengukuran kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemiskinan absolut berbasis kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan mencerminkan nilai moneter minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan diukur dari sisi pengeluaran, bukan pendapatan, karena pengeluaran dianggap lebih stabil dan lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Garis kemiskinan menurut BPS terdiri dari dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Pangan (GKP) dan Garis Kemiskinan Non-Pangan (GKNP). Garis Kemiskinan Pangan dihitung berdasarkan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi sebesar 2.100

kilokalori per kapita per hari. Kebutuhan energi tersebut direpresentasikan melalui paket komoditas pangan yang umum dikonsumsi oleh penduduk Indonesia, seperti beras, umbi-umbian, ikan, daging, telur, sayur, dan bahan pangan lainnya. Dengan demikian, GKP mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik yang sehat.

Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Pangan mencakup kebutuhan dasar selain pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dan kebutuhan sosial dasar lainnya. Komponen non-pangan ini dihitung berdasarkan pola pengeluaran rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, sehingga mencerminkan kebutuhan minimum yang realistis sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan menggabungkan GKP dan GKNP, BPS memperoleh Garis Kemiskinan total yang digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan status miskin atau tidak miskin.

Pendekatan yang digunakan BPS memiliki keunggulan dalam hal konsistensi dan kemudahan perbandingan antar wilayah dan antar waktu. Dengan menggunakan standar kebutuhan dasar yang relatif seragam, data kemiskinan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan nasional dan daerah, serta sebagai indikator kinerja pembangunan. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Pengukuran kemiskinan berbasis garis kemiskinan cenderung bersifat statis dan belum sepenuhnya menangkap dimensi non-materiil kemiskinan, seperti kerentanan, ketidakamanan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik berkualitas.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ukuran kemiskinan menurut BPS tetap memiliki peran yang sangat penting karena menjadi rujukan utama dalam penentuan sasaran program pengentasan kemiskinan dan alokasi anggaran. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam literatur pembangunan, penggunaan ukuran kemiskinan berbasis garis kemiskinan perlu dilengkapi dengan pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin secara berkelanjutan.

C. KONSEP DAN UKURAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Ketimpangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata antar individu, kelompok masyarakat, atau wilayah. Ketimpangan umumnya diukur menggunakan indeks Gini, yang nilainya berkisar antara nol hingga satu. Nilai nol menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, sedangkan nilai satu menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi. Selain indeks Gini, ketimpangan juga dapat dianalisis melalui perbandingan pendapatan antar kelompok, seperti rasio antara pendapatan kelompok terkaya dan termiskin.

Dalam teori ekonomi pembangunan, ketimpangan pendapatan memiliki posisi yang ambivalen. Di satu sisi, ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi awal dari proses pembangunan, terutama ketika transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa berlangsung. Di sisi lain, ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menghambat pembangunan karena menurunkan akses kelompok miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal produktif. Ketimpangan yang tinggi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat laju penurunan kemiskinan karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan atas. Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi kelompok miskin hanya memperoleh manfaat yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar isu distribusi, melainkan faktor penentu efektivitas pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendapatan juga memiliki dimensi spasial yang kuat. Disparitas antar wilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan barat dan timur Indonesia, mencerminkan perbedaan akses terhadap infrastruktur, investasi, dan layanan publik. Oleh karena itu, analisis ketimpangan pendapatan tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan yang berbasis wilayah.

Kurva Lorenz sebagai Alat Analisis Ketimpangan Pendapatan

Kurva Lorenz merupakan alat grafis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu

masyarakat. Menurut Perkins et al. (2013), Kurva Lorenz menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari kondisi pemerataan sempurna. Kurva ini dibangun dengan membandingkan persentase kumulatif penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang mereka terima.

Pada sumbu horizontal (sumbu X) ditunjukkan persentase kumulatif penduduk, dimulai dari kelompok berpendapatan terendah hingga tertinggi. Pada sumbu vertikal (sumbu Y) ditunjukkan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Garis diagonal dari titik nol ke titik seratus persen disebut sebagai garis pemerataan sempurna (line of perfect equality). Garis ini menggambarkan kondisi ideal di mana setiap persentase penduduk menerima persentase pendapatan yang sama.

Jika distribusi pendapatan benar-benar merata, maka Kurva Lorenz akan berimpit dengan garis pemerataan sempurna. Namun, dalam kenyataan, Kurva Lorenz hampir selalu berada di bawah garis tersebut, yang mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan. Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat (Perkins et al., 2013). Misalkan terdapat 5 rumah tangga dengan distribusi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Contoh Distribusi Pendapatan yang Merata

Rumah Tangga	Persentase Penduduk	Persentase Pendapatan
1	20%	20%
2	40%	40%
3	60%	60%
4	80%	80%
5	100%	100%

Dalam kondisi ini, setiap 20 persen penduduk menerima 20 persen pendapatan. Kurva Lorenz akan berimpit dengan garis diagonal, yang menunjukkan distribusi pendapatan sepenuhnya merata. Nilai Gini Rasio pada kondisi ini adalah nol, yang berarti tidak terdapat ketimpangan pendapatan. Distribusi seperti ini bersifat teoretis dan jarang ditemukan dalam dunia nyata, tetapi penting sebagai pembanding ideal dalam analisis ketimpangan. Sebagai perbandingan, misalkan terdapat 5 rumah tangga dengan distribusi pendapatan berikut:

Tabel 2. 2. Contoh Distribusi Pendapatan yang tidak merata

Rumah Tangga	Persentase Penduduk	Persentase Pendapatan
1 (termiskin)	20%	5%
2	40%	10%
3	60%	20%
4	80%	35%
5 (terkaya)	100%	100%

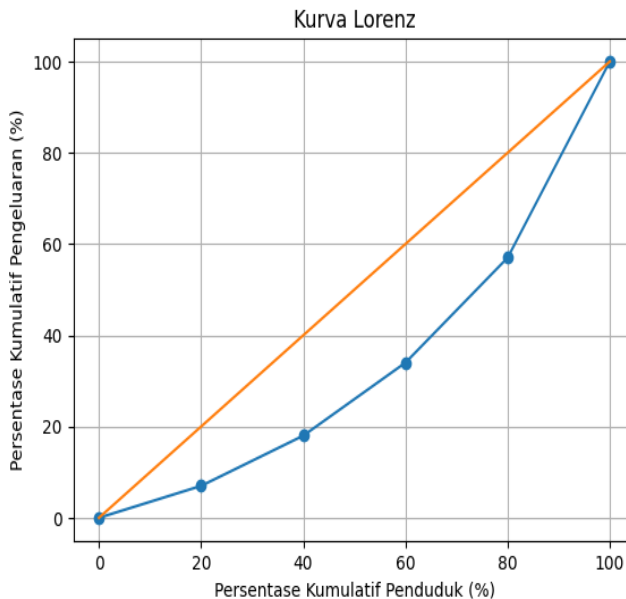
Dalam contoh ini, 40 persen penduduk terbawah hanya menguasai 10 persen pendapatan, sementara 20 persen penduduk teratas menguasai 65 persen pendapatan. Kurva Lorenz akan melengkung jauh ke bawah dari garis pemerataan sempurna. Semakin besar lengkungan ini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.

Menurut Perkins et al. (2013), kondisi seperti ini mencerminkan struktur ekonomi yang tidak inklusif, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Nilai Gini Rasio dalam distribusi seperti ini akan relatif tinggi, mencerminkan ketimpangan pendapatan yang signifikan.

Makna Kurva Lorenz dalam Analisis Pembangunan

Kurva Lorenz tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai dasar perhitungan Gini Rasio. Luas area antara garis pemerataan sempurna dan Kurva Lorenz mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan. Semakin besar area tersebut, semakin besar nilai Gini Rasio dan semakin tinggi ketimpangan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, Kurva Lorenz membantu perencanaan dan pengambil kebijakan untuk memahami apakah pertumbuhan ekonomi dinikmati secara luas atau hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ketika Kurva Lorenz semakin menjauh dari garis pemerataan sempurna, maka kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada penguatan distribusi pendapatan, misalnya melalui kebijakan fiskal pro-poor, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif.



Gambar 2. 1. Kurva Lorenz (Ilustratif Representatif)

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mempublikasikan data ketimpangan pendapatan yang mencerminkan distribusi pengeluaran penduduk menurut kelompok persentil atau kuintil. Berdasarkan pola umum data BPS, distribusi pengeluaran rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa kelompok penduduk berpengeluaran tinggi menguasai proporsi pengeluaran yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok penduduk berpengeluaran rendah. Pola ini dapat digunakan untuk membangun Kurva Lorenz sebagai alat visualisasi ketimpangan pendapatan.

Sebagai ilustrasi, Tabel 2.3. menyajikan distribusi pengeluaran penduduk Indonesia menurut kuintil, yang mencerminkan pola umum pada tingkat nasional.

Tabel 2. 3. Ilustratif Distribusi Pengeluaran Penduduk

Kuintil Penduduk	Persentase Penduduk Kumulatif	Persentase Pengeluaran	Persentase Pengeluaran Kumulatif
20% termiskin	20%	7%	7%
Kuintil 2	40%	11%	18%

Kuintil 3	60%	16%	34%
Kuintil 4	80%	23%	57%
20% terkaya	100%	43%	100%

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa 40 persen penduduk terbawah hanya menguasai sekitar 18 persen total pengeluaran, sementara 20 persen penduduk teratas menguasai lebih dari 40 persen pengeluaran nasional. Pola ini merupakan ciri khas distribusi pendapatan yang tidak merata dan konsisten dengan nilai Gini Rasio Indonesia yang berada pada kategori ketimpangan menengah. Semakin besar lengkungan Kurva Lorenz menjauhi garis pemerataan sempurna, semakin besar pula ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran (Perkins et al. 2013). Dalam contoh tersebut, lengkungan yang cukup tajam menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi.

Sebagai pembandingan, pada distribusi yang lebih merata bahwa 40 persen penduduk terbawah idealnya menguasai mendekati 40 persen pengeluaran. Kurva Lorenz akan lebih dekat ke garis diagonal dan Nilai Gini Rasio akan lebih rendah. Namun, pada umumnya fakta menunjukkan bahwa kondisi tersebut belum tercapai, sehingga kebijakan pembangunan perlu diarahkan untuk memperkuat distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif.

D. PERTUMBUHAN EKONOMI, HIPOTESIS KUZNETS, DAN KRITIKNYA

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan telah lama menjadi perhatian utama dalam literatur ekonomi pembangunan. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi baru. Namun, seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan meluasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, ketimpangan akan menurun. Meskipun hipotesis Kuznets memberikan kerangka awal untuk memahami dinamika ketimpangan, banyak studi empiris menunjukkan bahwa pola U-terbalik tersebut tidak selalu berlaku, terutama di negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Richard H. (2003). *Economic Growth, Inequality, and Poverty Findings from a New Data Set*. Washington, DC: World Bank. Available online: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/f81680ff-8481-5679-9537-64a6667c2f01>.
- Ali, Majid, Muhammad Tariq, and Muhammad Azam Khan. (2022). *Economic Growth, Financial Development, Income Inequality and Poverty Relationship: An Empirical Assessment for Developing Countries*. IRASD Journal of Economics. 4, 14–24.
- Amar, S., & Pratama, I. (2020). *Exploring The Link Between Income Inequality, Poverty Reduction and Economic Growth: An ASEAN perspective*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11(2), 24–41.
- Anand, S., & Kanbur, S. M. R. (1984). *Inequality and development: A critique*. Journal of Development Economics, 16(1–2), 19–43.
- Asongu, S., & Odhiambo, N. M. (2023). *The Effect of Inequality on Poverty and Severity of Poverty in Sub-Saharan Africa: The Role of Financial Development Institutions*. Politics & Policy, 51, 898–918.
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What Can Be Done?*. Harvard University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctvjghxqh>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Konsep dan Pengukuran Kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). Statistik Indonesia 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html>
- Birhanu, D. S., Tarekegn, T. K., & Kabeta, N. G. (2023). Food security and household welfare in food-insecure areas: Evidence from rural Ethiopia. *Journal of Rural Studies*, 105, 166–176.
- Brady, D. (2019). Theories of the Causes of Poverty. *Annual Review of Sociology*, 45, 155–175. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022550>
- Bucheli, M., Rossi, M., & Amábile, F. (2018). Inequality and fiscal policies in Uruguay by race. *Journal of Economic Inequality*, 16, 389–411.
- Cammeraat, E. (2020). The Relationship Between Different Social Expenditure Schemes and Poverty, Inequality and Economic Growth. *International Social Security Review*. 73, 101–23.
- Cerra, Valerie, Ruy Lama, and Norman Loayza. (2021). Links Between Growth, Inequality, and Poverty: A Survey. *IMF Working Papers*, 21/68. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in The Third World*. John Willey and Sons.
- de Janvry, A., & Sadoulet, E. (2021). *Development Economics: Theory and Practice* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003024545>
- Deininger, K., & Squire, L. (1998). New ways of looking at old issues: Inequality and growth. *Journal of Development Economics*, 57(2), 259–287.
- FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2015). *The State of Food and Agriculture*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Febriani, A. S. (2023). Assessment of Food Security, Food Independence and Community Welfare in Food Insecure Areas. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(6), 52–63.

- Fosu, A. K. (2017). Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. *Research in Economics*, 71, 306-336.
- Friedman, S. L., Scholnick, E. K., & Cocking, R. R. (Eds.). (1987). *Blueprints for Thinking: The Role of Planning in Cognitive Development*. Cambridge University Press.
- Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income Distribution and Macroeconomics. *The Review of Economic Studies*, 60(1), 35–52.
- Higgins, S., & Pereira, C. (2013). The effects of Brazil's high taxation and spending on the distribution of household income. *Public Finance Review*, 42, 1–28.
- Hirvonen, K., Mascagni, G., & Roelen, K. (2018). Linking Taxation and Social Protection: Evidence on Redistribution and Poverty Reduction in Ethiopia. *International Social Security Review*, 71(1), 3–24.
- Huang, G.Q., & Tsai, F.S. (2021). Social Innovation for Food Security and Tourism Poverty Alleviation: Some Examples from China. *Frontiers in Psychology*, 12, 614469.
- Iniguez-Montiel, A. J., & Kurosaki, T. (2018). Growth, inequality and poverty dynamics in Mexico. *Latin American Economic Review*, 27, 12. <https://doi.org/10.1007/s40503-018-0056-6>
- Islam, R., Abdul Ghani, A. B., Abidin, I. Z., & Rayaiappan, J. M. (2017). Impact on poverty and income inequality in Malaysia's economic growth. *Problems and Perspectives in Management*, 15, 55–62.
- Jouini, N., Lustig, N., Moumami, A., & Shimeles, A. (2018). Fiscal policy, income redistribution, and poverty reduction: Evidence from Tunisia. *Review of Income and Wealth*, 64(S1), S225–S248.
- Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is Pro-poor Growth?. *Asian Development Review*, 18, 1–16.
- Kakwani, N., Prakash, B., & Son, H. (2000). Growth, Inequality, and Poverty: An Introduction. *Asian Development Review*, 18, 1–22.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/nota-keuangan-r-apbn-2025>
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kouadio, Hugues Kouassi, and Lewis Landry Gakpa. (2022). Do Economic Growth and Institutional Quality Reduce Poverty and Inequality in West Africa?. *Journal of Policy Modeling* 44, 41–63.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Kuznets, S.S. (1963). Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: VIII. Distribution of Income by Size. *Economic Development and Cultural Change*, 11, 1 - 80.
- Lakner, Crisstoph, Daniel Gerszon Mahler, Mario Negre, and Espen Beer Prydz. (2022). How much does reducing inequality matter for global poverty? *Journal of Economic Inequality* 20, 559–85.
- Marrero, Gustavo A., and Luis Servén. 2022. Growth, inequality and poverty: A robust relationship? *Empirical Economics* 63: 725–91.
- Mulyana, B. (2010). *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.

- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford University Press.
- Nursini, N., Agussalim, A., Suhab, S., & Tawakkal, T. (2018). Implementing Pro-Poor Budgeting in Poverty Reduction: A Case of Local Government in Bone District, South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(1), 30–38.
- Nursini, N., & Tawakkal, T. (2019). Poverty alleviation in the context of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics & Sociology*, 12, 270–285.
- Nursini, N. (2020). Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Poverty Reduction: Empirical Evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7, 153–66.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- OECD. (2015). *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2016). *Regional Outlook*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2019). *Principles on Public Investment*. Paris: OECD Publishing.
- Perkins, Dwight Heald, Steven Radelet, David L. Lindauer, and Steven A. Block. (2013). *Economics of Development*, 7th ed. New York: W. W. Norton & Company. Available online: <http://data.worldbank.org/about/country-classifications>
- Ravallion, M. (1997). Can High-Inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty? *Economics Letters*, 56, 51-57.
- Ravallion, M., & Chen, S. (1997). What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty? *The World Bank Economic Review*, 11(2), 357–382. <http://www.jstor.org/stable/3990232>
- Ravallion, Martin. (2001). Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages. *World Development*, 29, 1803–15.

- Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring Pro-Poor Growth. *Economics Letters*, 78(1), 93–99.
- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Ravallion, Martin, and Shaouha Chen. (2022). Is that really a Kuznets curve? Turning points for income inequality in China. *Journal of Economic Inequality*, 20, 749–76.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40765/uu-no-25-tahun-2004>.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39008/pp-no-58-tahun-2005>
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117485/permen-no-13-tahun-2006>
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-54-tahun-2010>
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104109/permendagri-no-86-tahun-2017>

- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94590/pp-no-12-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/228128/permendagri-no-90-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2024). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045. <https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/XaadqZgUefiwF UWdYs8Yr1GBGWzIshAdZtnrOu3.pdf>
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public Finance* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Pritchett, L. (2003). Safety Nets or Safety Ropes? Dynamic Benefit Incidence of Two Crisis Programs in Indonesia. *World Development*, 31(7), 1257–1277.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic Development* (7th ed.). Addison Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- UNDP. (2020). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.
- Usmanova, Aziza. (2023). The Impact of Economic Growth and Fiscal Policy on Poverty Rate in Uzbekistan: Application of Neutrosophic Theory and Time Series Approaches. *International Journal of Neutrosophic Science*, 21, 107–17.
- Wang, Qiang, Ting Yang, and Rongrong Li. 2023. Does income inequality reshape the environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis? A nonlinear panel data analysis. *Environmental Research* 216: 114575

- Wicaksono, E., & Amir, H. (2017). The Sources of Income Inequality in Indonesia: A Regression-Based Inequality Decomposition. Asian Development Bank Institute.
<https://www.adbi.org/publications/sources-income-inequality-indonesia>
- World Bank. (2018). The State of Social Safety Nets. Washington, DC: World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/8fef01f3-b9f-5e6d-b3f3-a9d5d846f5aa>
- World Bank. (2020). World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains.
<https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/856e3de3-cff9-5f26-8c64-a7ae95f29fa6>
- World Bank. (2022). World development report 2022: Finance for an equitable recovery.
<https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/3627e0f6-306c-5df1-9cd2-6bc494c9d2a0>
- World Bank. (2024). World development report 2024: The middle-income trap.
<https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7c5cd962-11ae-4101-8f3f-e15b86135f0e>
- World Bank. (2025). World development report 2025: Standards for Development.
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/638aca2d-596b-4021-9a02-d21d20ca7f14>
- World Bank (2025). Bank Dunia Memperbarui Garis Kemiskinan Global: <https://www.worldbank.org/in/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia>

Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kebijakan Fiskal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan struktural yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan fiskal dan proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin luas dalam pengelolaan fiskal, namun efektivitas kebijakan yang dihasilkan sangat bergantung pada kemampuan analitis dalam memahami hubungan antara instrumen fiskal, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini menghadirkan pendekatan teoretis dan empiris secara terintegrasi dalam menganalisis keterkaitan antara kemiskinan, ketimpangan, dan kebijakan fiskal dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Berbeda dari buku ajar yang bersifat deskriptif, buku ini tidak hanya menguraikan konsep dan teori pembangunan, tetapi juga menyajikan analisis data serta hasil studi empiris untuk menguji hubungan antarvariabel pembangunan secara sistematis.

Kontribusi utama buku ini terletak pada perumusan model pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang berbasis analisis empiris dan relevan dengan konteks pembangunan daerah. Model tersebut disusun sebagai kerangka konseptual dan operasional yang dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, maupun perencana pembangunan dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis bukti.

Disusun secara terstruktur dan analitis, buku ini dilengkapi dengan kerangka pemikiran, studi kasus, rangkuman, serta soal latihan pada setiap bab. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan ajar, tetapi juga sebagai referensi ilmiah yang memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah.



IKAPI
INDONESIAN ASSOCIATION OF PUBLIC INTELLECTUALS

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)
Telp/WA : +62 896 5427 3996

